



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas  
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : dishublh.anambas@gmail.com

Tarempa, 30 September 2025

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
di  
Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor :B/000.7.2.4/188/DISHUBLH.SPNG/09/2025

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen Rencana Strategis ( <i>Renstra</i> ) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Anambas  <i>(Soft Copy dan Hard Copy)</i>	1 Dokumen	Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diterima tanggal : .....

Yang menerima

Nama : .....

NIP/NIPTT : .....

Tanda tangan : .....



Kepala Dinas Perhubungan  
dan Lingkungan Hidup,

Abdul Kadir, ST.M.,Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19790125 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ANAMBAS

# RENCANA STRATEGIS | 2025 (RENSTRA) | 2029



## DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jalan Soekarno Hatta, Batu Tambun, Kecamatan Siantan, Kepulauan Anambas  
Kepulauan Riau 29791 Pos-el : [dishublh.anambas@gmail.com](mailto:dishublh.anambas@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra ini dirancang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang menitikberatkan peningkatan pelayanan publik melalui bidang Lingkungan Hidup dengan program prioritas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta pada bidang Transportasi pembangunan infrastruktur jalan dan Pelabuhan serta program prioritas pengembangan akses Transportasi yang memangkas rentang kendali yang aman, nyaman, dan selamat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, baik dari internal Dinas maupun dari mitra kerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, masukan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan strategis yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**ABDUL KADIR, S.T., M.Si**

Pembina Tk. I (IV.b)

NIP. 19790125 201001 1 007



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>iii</b>	
<b>BAB I</b>		
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>	
1.1 Latar Belakang.....	4	
1.2 Landasan Hukum .....	5	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11	
1.4 Sistematika Penulisan.....	12	
<b>BAB II</b>		
<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD ...</b>	<b>14</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	26	
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	30	
2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34	
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	35	
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37	
2.9 Penentuan Isu-isu Strategis.....	39	
<b>BAB III</b>		
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>44</b>	
<b>BAB IV</b>		
<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>50</b>	
<b>BAB V.....</b>		<b>78</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>	



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2. 1	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan .....	17
Tabel 2. 2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Struktural .....	18
Tabel 2. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan .....	19
Tabel 2. 4	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2. 5	
Sarana dan Prasarana Pendukung.....	21
Tabel 2. 6	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas .....	23
Tabel 2. 7	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	25
Tabel 2. 8	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	33
Tabel 3. 1	
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD .....	45
Tabel 3. 2	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	46
Tabel 4. 2	
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD .....	55
Tabel 4. 3	
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	64
Tabel 4. 4	
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	74
Tabel 4. 5	
Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.....	76
Tabel 4. 6	
Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	77
Tabel 4. 7	
Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	78
<b>Gambar 2. 1</b>	
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas .....	16



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen tertulis yang berisi arah, tujuan dan langkah-langkah strategis suatu organisasi atau instansi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak Aneng dan Bapak Raja Bayu Febri Gunadian, SE yang secara resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Sesuai dengan waktu terpilihnya maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berada pada periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk menjawab tantangan pembangunan di sektor perhubungan dan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia, memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang unik, sehingga memerlukan strategi pembangunan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra ini menjadi dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun ke depan.

Dalam konteks daerah, perencanaan pembangunan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)



Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan ini memberikan panduan teknis terkait tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra sebagai bagian integral dari RPJMD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi perangkat daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Melalui dokumen ini, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan transportasi yang berkeadilan.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga didasari oleh visi dan misi kepala daerah yang mengedepankan pembangunan berbasis kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dengan pendekatan ini, diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman yang aplikatif, adaptif, dan relevan dengan dinamika pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra ini diharapkan menjadi landasan dalam mengarahkan kebijakan operasional Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, guna mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15



- Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/menlhk/setjen/kum.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);



28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 324);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Transportasi Pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 325);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang perhubungan dan lingkungan hidup.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).
4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan transportasi yang berkeadilan.



5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra 2025-2029;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan serta berisi tentang identifikasi permasalahan strategis dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas;



- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Dalam bab ini menjelaskan tujuan, sasaran, dan strategi serta arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan organisasi pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Bab ini menjelaskan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan serta indikator kinerja pelayanan bidang urusan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- BAB V PENUTUP**  
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki tugas utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan dan lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini berfungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;



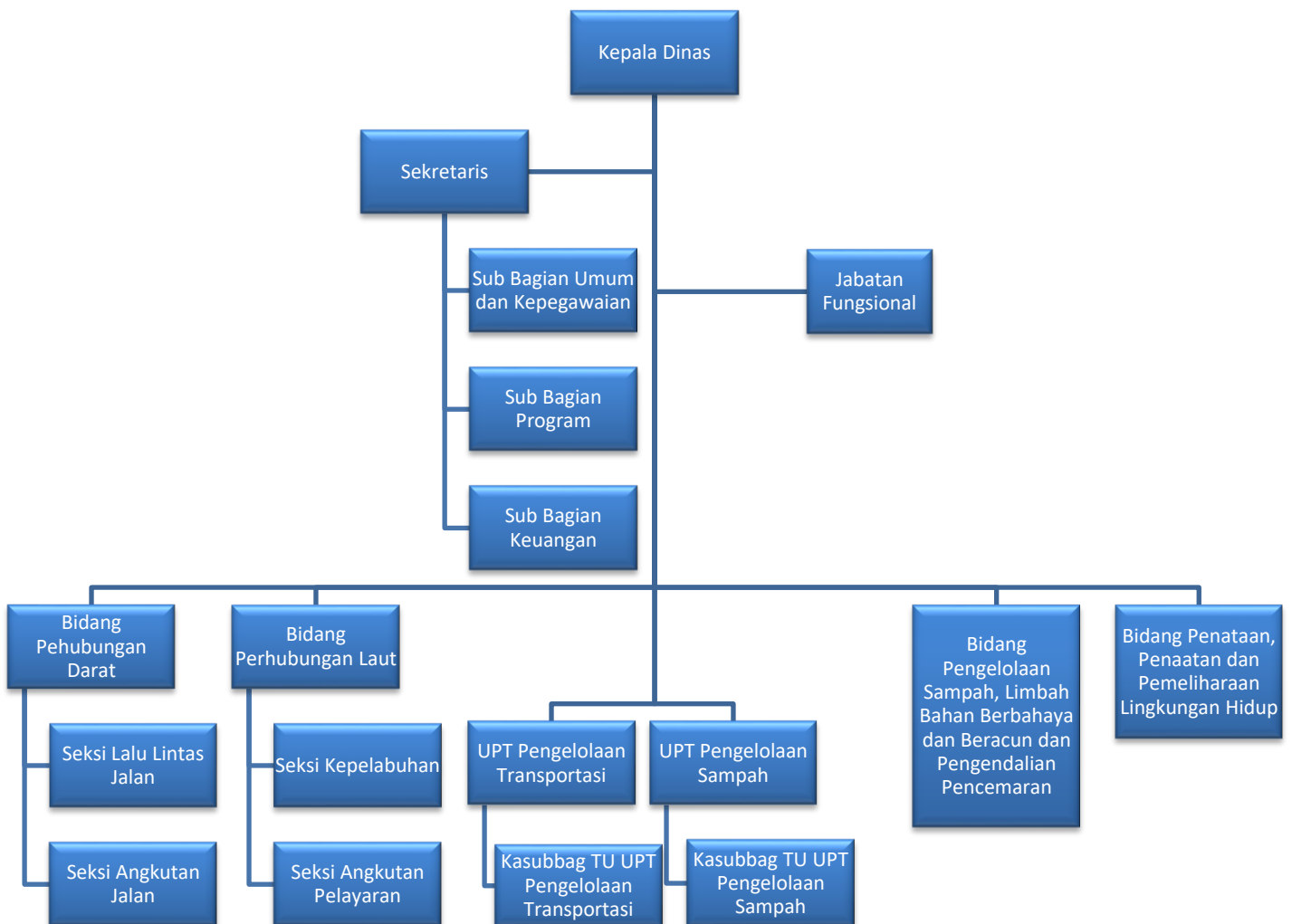
5. Pengelolaan barang milik daerah;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
  - Seksi Lalu Lintas Jalan
  - Seksi Angkutan Jalan
4. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
  - Seksi Kepelabuhan
  - Seksi Angkutan Pelayaran
5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran
6. Bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) sebagai berikut :
  - a. UPT Pengelolaan Transportasi dan;
  - b. UPT Pengelolaan Sampah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Lebih lanjut Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**





## 2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Per Januari 2025 berjumlah 211 (dua ratus sebelas) orang terdiri dari 36 Pegawai Negeri Sipil dan 175 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

### a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi Pangkat/golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan Ruang**

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat I ( IV/b)	1
2.	Pembina (IV/a)	2
3.	Penata Tk. I (III/d)	9
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda Tk.I (III/b)	6
6.	Penata Muda (III/a)	10
7.	Pengatur Tk. I (II/d)	3
8.	PPPK	178
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>



Adapun komposisi Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi jabatan Struktural, JF dan Jabatan Pelaksana sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**Berdasarkan Kualifikasi Jabatan Struktural, JF dan Jabatan Pelaksana**

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II.b	1
2.	Sekretaris	Eselon III.a	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III.b	4
4.	Kepala Seksi, Kasubbag, dan Ka.UPT	Eselon IV.a	8
5.	Kepala TU UPT	Eselon IV.b	2
6.	Fungsional	-	7
7.	Pelaksana	-	191
<b>Jumlah</b>			<b>214</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah sumber daya aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup di dominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 178 orang sedangkan ASN berjumlah 36 Orang yang terdiri dari jabatan eselon II.b berjumlah 1 orang, eselon III.a berjumlah 1 orang, eselon III.b berjumlah 4 orang, eselon IV.a berjumlah 8 orang, eselon IV.b berjumlah 2 orang, jabatan fungsional berjumlah 7 orang, jabatan pelaksana berjumlah 191 orang.



**b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	ASN dan PPPK	S2 : 5
		S1/D4 : 39
		D3 : 15
		SLTA Sederajat : 125
		SMP Sederajat : 5
		SD : 24
<b>Jumlah</b>		<b>214</b>

**c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan PPPK, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan PPPK berdasar Jenis kelamin.

**Tabel 2.4**

**Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin**

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN dan PPPK	159	55
<b>Jumlah</b>	<b>214</b>	

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup. Namun, saat ini terdapat tantangan



yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Tak kalah penting, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi



kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan gambaran dari kemampuan instansi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya, yakni meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perhubungan dan lingkungan hidup. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya terkait dengan peningkatan aksesibilitas, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang prima. Dalam pelaksanaannya, kinerja pelayanan ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi peran ASN di setiap unit kerja. Pendekatan yang bersifat koordinatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, kinerja pelayanan juga didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti ruang kerja, teknologi informasi, dan perlengkapan administrasi memainkan peran penting dalam mempercepat proses pelayanan.

Berbagai capaian telah berhasil diwujudkan meskipun dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran, serta kondisi geografis yang sulit. Kendati demikian, komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor kunci dalam mendorong pencapaian yang signifikan. Capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prinsip keberlanjutan pembangunan. Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan				73.02	73.29	73.55	73.81	74,08	74,84	79.81	73.46	82.32	80.61	-	-	109.30%	100.23%	112%	109%	-	-
2	Indeks Kualitas Air				56.6	56.7	56.8	56.9	57,00	57,10	70	50	70	60	-	-	123.67%	88.18%	123%	105%	-	-
3	Indeks Kualitas Udara				85.35	85.45	85.55	85.65	85,75	85,85	87.04	89.94	89.37	94.45	-	-	101.98%	105.25%	104%	110%	-	-
4	Indeks Kualitas Lahan				7843	79.27	80.11	80.96	81,81	82,66	83.27	83.27	90.45	90.4	-	-	1.06%	105.05%	113%	112%	-	-
5	Nilai Reformasi Birokrasi				30	40	50	60.1	60,20	60,20	23.56	23.56	-	-	-	-	78.53%	58.90%	-	-	-	-
6	Nilai AKIP				55	57	60	60.1	60,20	60,20	51.73	51.73	66.1	66.85	-	-	94.05%	90.75%	110%	111%	-	-
7	Rasio Konektivitas Angkutan Laut				0.45	0.61	0.74	0.84	1	1	0.45	0.83	0.83	0.87	-	-	100.00%	136.07%	112%	104%	-	-
8	Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan				0.33	0.5	0.67	0.83	1	1	0.33	0.83	0.33	0.33	-	-	100.00%	166.00%	49%	40%	-	-
9	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi				43,20	59.5	73	83.8	100,00	100,00	-	-	33	33	-	-	-	-	45%	39%	-	-
10	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi Saprasi Alat Perlengkapan Jalan				51,61	59.45	66.82	74.65	82,49	89,86	-	-	56	56	-	-	-	-	84%	75%	-	-



Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menunjukkan tren positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi strategisnya. Pada indikator *Nilai Reformasi Birokrasi*, terlihat adanya target peningkatan yang konsisten dari 30 pada tahun 2021 hingga mencapai 60,20, pada tahun 2026. Hal yang sama juga terlihat pada indikator *Nilai AKIP*, dengan target bertahap dari 55 di tahun 2021 menjadi 60,20 pada tahun 2026. Capaian ini menggambarkan upaya instansi dalam memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel, selaras dengan tujuan reformasi birokrasi nasional.

Selain itu, indikator terkait urusan perhubungan seperti Rasio Konektivitas angkutan laut Jumlah peningkatan dari 0,45 pada tahun 2021 menjadi 0,87 pada tahun 2024. Rasio Konektivitas Angkutan Penyeberangan ditargetkan meningkat dari 0,33 di tahun 2021 menjadi 0,83 di tahun 2024. Sementara itu, indikator terkait kualitas Lingkungan Hidup dengan Standar yang Ditetapkan terus meningkat dari 79,81% pada tahun 2021 menjadi 80,60% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta pengembangan sektor transportasi yang aman, nyaman, dan efisien.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, yaitu:

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026**

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp 15,801,718,266	Rp13,699,190,439	Rp 13,731,267,801	Rp13,949,771,773	Rp 28,349,216,858	Rp 13,851,403,352	Rp 14,197,407,861	Rp 13,224,297,046	Rp 11,995,551,874	Rp 11,640,834,727	0.00	0.00	89.85	96.53	87.36	83.45	0.00	0.00	Rp 16,563,761,415	Rp 12,764,522,877
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (UPT Pengelolaan Transportasi)	Rp 1,000,000	Rp 127,683,816	Rp 386,495,816	Rp 745,786,357	Rp 608,071,204	Rp 492,967,588	Rp 250,000	Rp 103,039,800	Rp 380,234,489	Rp 604,437,695	0.00	0.00	25.00	80.70	98.38	81.05	0.00	0.00	Rp 393,667,464	Rp 271,990,496
3	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (UPT Pengelolaan Sampah)	Rp 1,120,322,060	Rp 668,505,800	Rp 798,417,236	Rp 477,340,800	Rp 932,265,477	Rp 477,340,520	Rp 821,866,105	Rp 633,146,100	Rp 772,541,239	Rp 334,421,000	0.00	0.00	73.36	94.71	96.76	70.06	0.00	0.00	Rp 745,698,649	Rp 640,493,611
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6,185,505,734	Rp 3,488,110,260	Rp 15,055,533,216	Rp 1,713,077,670	Rp 260,000,000	Rp 95,000,000	Rp 3,504,822,000	Rp 3,349,848,157	Rp 11,078,746,775	Rp 1,391,137,470	0.00	0.00	56.66	96.04	73.59	81.21	0.00	0.00	Rp 4,466,204,480	Rp 4,831,138,601
5	Program Pengelolaan Pelayanan	Rp 17,234,500,045	Rp 7,182,763,846	Rp 8,604,144,184	Rp 4,078,040,945	Rp 14,103,027,469	Rp 11,524,923,662	Rp 6,844,209,723	Rp 6,982,789,939	Rp 4,718,226,002	Rp 1,929,778,113	0.00	0.00	39.71	97.22	54.84	47.32	0.00	0.00	Rp 10,454,566,692	Rp 5,118,750,944
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 601,223,000	Rp 218,878,100	Rp 649,297,850	Rp -			Rp 256,382,589	Rp 218,804,200	Rp 546,286,911	Rp -	0.00	0.00	42.64	99.97	84.14	0.00	0.00	0.00	Rp 244,899,825	Rp 255,368,425
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 180,068,000	Rp 74,209,400	Rp 107,750,000	Rp 26,150,000	Rp 46,412,000	Rp 5,000,000	Rp 19,359,800	Rp 63,176,514	Rp 14,651,472	Rp 20,272,999	0.00	0.00	10.75	85.13	13.60	77.53	0.00	0.00	Rp 73,264,900	Rp 29,365,196
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 211,402,000	Rp 110,289,000	Rp 102,660,071	Rp 58,690,735	Rp 57,151,491	Rp 5,000,000	Rp 99,890,000	Rp 96,419,850	Rp 28,275,100	Rp 27,143,350	0.00	0.00	47.25	87.42	27.54	46.25	0.00	0.00	Rp 90,865,549	Rp 62,932,075
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 5,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 833,333	Rp -
10	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 185,050,000	Rp 52,867,300	Rp 50,000,000	Rp 143,054,940	Rp 379,967,018	Rp 5,000,000	Rp 91,244,386	Rp 52,042,600	Rp 30,087,220	Rp 105,823,126	0.00	0.00	49.31	98.44	60.17	73.97	0.00	0.00	Rp 135,989,876	Rp 69,799,333
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 358,792,000	Rp 65,824,200	Rp 130,560,150	Rp 56,257,360	Rp 180,620,025	Rp 5,000,000	Rp 124,898,000	Rp 65,374,200	Rp 67,847,200	Rp 21,738,000	0.00	0.00	34.81	99.32	51.97	38.64	0.00	0.00	Rp 132,842,289	Rp 69,964,350
12	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 328,382,000	Rp 3,168,000	Rp -	Rp -		Rp 5,000,000	Rp 223,639,000	Rp 3,148,200	Rp -	Rp -	0.00	0.00	68.10	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 56,091,667	Rp 56,696,800
13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp 5,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Rp 833,333	Rp -
14	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 984,209,000	Rp 424,985,800	Rp 1,139,050,829	Rp 343,812,826	Rp 338,588,000	Rp 10,000,000	Rp 545,347,600	Rp 432,181,198	Rp 949,905,303	Rp 238,048,240	0.00	0.00	55.41	101.69	83.39	69.24	0.00	0.00	Rp 540,107,743	Rp 541,370,585



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### 1. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dihadapkan pada berbagai tantangan yang memengaruhi pengembangan kualitas pelayanan. Tantangan ini berasal dari aspek internal maupun eksternal, yang memerlukan strategi penanganan yang tepat dan terencana.

Identifikasi terhadap tantangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hambatan yang ada, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mengatasinya.

#### a. Aspek Internal

Tantangan yang berasal dari aspek internal adalah :

1. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan teknis dan operasional yang semakin kompleks di era modern.
2. Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi tantangan yang memengaruhi kualitas pelayanan publik, terutama di sektor transportasi dan lingkungan hidup. Fasilitas transportasi, seperti pelabuhan, jalan, dan bandara, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang secara lebih efektif. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang lainnya, termasuk pengelolaan limbah dan akses air bersih, membutuhkan pembaruan dan peningkatan kapasitas agar mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
3. Terbatasnya pendanaan sering kali menghambat pelaksanaan inisiatif strategis yang diperlukan untuk



meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, ketergantungan pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau provinsi membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunannya.

4. Proses birokrasi yang kompleks sering kali memperlambat pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga memengaruhi efektivitas pelayanan publik. Selain itu, kurangnya sinergi antara berbagai instansi dan sektor terkait dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang terintegrasi.

#### b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah perairan luas menghadirkan tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Mobilitas masyarakat dan distribusi barang menjadi lebih kompleks karena keterbatasan sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh area secara efektif.
2. Tekanan terhadap sumber daya alam di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius, terutama akibat aktivitas eksploitasi yang tidak terkelola secara berkelanjutan. Sumber daya alam seperti perikanan, hutan, dan kawasan pesisir menghadapi ancaman kerusakan akibat penangkapan ikan berlebihan, penebangan liar, dan aktivitas ekonomi lainnya yang kurang ramah lingkungan. Selain itu, risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim menuntut langkah mitigasi yang proaktif dan adaptasi yang efektif untuk melindungi



masyarakat serta infrastruktur strategis.

3. Peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi menciptakan kebutuhan layanan publik yang semakin kompleks, termasuk infrastruktur, transportasi, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketidakseimbangan antara permintaan yang terus meningkat dan ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun manusia, menjadi hambatan yang perlu diatasi.
4. Dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah yang terjadi memerlukan respons yang cepat dan terencana untuk memastikan kebijakan baru dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.

## **2. Peluang**

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan pelayanan dalam lima tahun ke depan. Peluang ini muncul dari berbagai faktor, baik dari kebijakan nasional, potensi daerah, maupun dukungan masyarakat dan teknologi.

Adapun peluang yang mendukung yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Kebijakan Nasional yang mendukung  
Kebijakan pemerintah pusat yang berfokus pada pembangunan wilayah kepulauan, daerah tertinggal, daerah terluar dan perbatasan membuka peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran dan program strategis yang mendukung peningkatan pelayanan.



2. **Potensi Sumber Daya Daerah**  
Potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor kelautan, perikanan dan pariwisata serta dikaitkan dengan keunikan budaya dan keindahan alam di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi daya ungkit untuk pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
3. **Kemajuan teknologi informasi**  
Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, terutama dalam konteks digitalisasi dan sistem manajemen pelayanan berbasis elektronik. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. **Dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan**  
Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup tidak hanya mencerminkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan komunitas lokal. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil membuka peluang untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program prioritas. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi, dan penyediaan sumber daya tambahan, sementara organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan program.
5. **Dukungan internasional**  
Dukungan internasional membuka peluang besar bagi Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjalin kerja sama strategis dalam bentuk hibah, bantuan teknis, dan investasi, khususnya di sektor lingkungan hidup dan perhubungan. Melalui program global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, daerah dapat



memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan internasional untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menghadapi berbagai permasalahan dalam upaya pengembangan sektor perhubungan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, yang mencakup penyediaan aksesibilitas dan konektivitas, serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang. Hal ini menjadi landasan penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mengatasi permasalahan tersebut secara efektif.

Penjabaran permasalahan pada setiap bidang akan membantu dalam memahami akar penyebab dan dampaknya terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga solusi yang dirancang dapat lebih terarah dan relevan.

## **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas dan kualitas layanan kepada masyarakat. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban, seperti keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas antarwilayah, degradasi lingkungan, pengelolaan limbah, dan tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas ekonomi dan perubahan iklim.

Kondisi ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian serius agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal dan



sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap permasalahan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pengembangan pelayanan yang lebih baik.

#### 1. Bidang Perhubungan

- Keterbatasan Infrastruktur transportasi

Ketersediaan pelabuhan yang belum memadai untuk mendukung aktivitas transportasi antarwilayah serta minimnya fasilitas transportasi umum yang andal dan efisien.

- Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah

Sulitnya akses transportasi ke pulau-pulau kecil akibat keterbatasan sarana dan prasarana serta belum optimalnya rute transportasi darat, laut untuk menunjang mobilitas masyarakat dan barang.

- Sistem transportasi yang belum terintegrasi

Ketidakterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara serta kurangnya perencanaan transportasi yang berbasis kebutuhan wilayah kepulauan.

- Kurangnya pemeliharaan infrastruktur

Infrastruktur transportasi yang ada sering kali mengalami kerusakan akibat minimnya pemeliharaan rutin.

- Masalah keselamatan dan keamanan transportasi

Masih rendahnya standar keselamatan pada moda transportasi laut, terutama untuk kapal-kapal kecil serta kurangnya pengawasan terhadap peraturan lalu lintas dan kelayakan operasional transportasi.

#### 2. Bidang Lingkungan Hidup

- Degradasi Lingkungan

Kerusakan ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan mangrove akibat aktivitas manusia serta penurunan kualitas udara, tanah, dan air akibat pencemaran.



- Pengelolaan limbah yang belum optimal  
Sistem pengelolaan sampah dan limbah yang belum memadai, termasuk minimnya fasilitas pengolahan limbah domestik dan industri serta peningkatan volume sampah plastik yang sulit terurai.
- Tekanan terhadap sumber daya alam  
Eksplorasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan berlebihan serta kurangnya pengawasan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.
- Dampak perubahan iklim  
Kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil serta intensitas bencana alam, seperti badai dan banjir, yang meningkat akibat perubahan iklim global.
- Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang rendah, masih kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- Kendala regulasi dan penegakan hukum  
Kurangnya regulasi yang spesifik untuk mengatur aktivitas berbasis lingkungan di wilayah kepulauan dan penegakan hukum yang belum tegas terhadap pelanggaran lingkungan hidup.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya.



**Tabel. 2.8**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelabuhan belum memadai</li><li>- Minimnya fasilitas transportasi umum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi anggaran yang terbatas untuk pembangunan</li><li>- Kurangnya perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi</li></ul>
2	Aksesibilitas terbatas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sulitnya akses ke pulau kecil</li><li>- Rute transportasi belum optimal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geografis daerah yang menantang</li><li>- Belum ada integrasi perencanaan antar moda transportasi</li></ul>
3	Sistem transportasi belum terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya sistem transportasi berbasis kebutuhan daerah kepulauan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan kurang komprehensif</li><li>- Koordinasi lintas sektor yang masih lemah</li></ul>
4	Pengelolaan Limbah Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya fasilitas pengolahan limbah</li><li>- Peningkatan volume sampah plastik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Edukasi masyarakat yang masih rendah</li><li>- Belum adanya sistem pengelolaan limbah yang terpadu dan berkelanjutan</li></ul>
5	Degradasi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kerusakan ekosistem pesisir</li><li>- Pencemaran air, tanah, dan udara</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivitas manusia yang tidak terkendali</li><li>- Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum</li></ul>
6.	Tekanan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan</li><li>- Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas merusak lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah</li><li>- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah</li></ul>
7.	Dampak Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kenaikan permukaan air laut</li><li>- Intensitas bencana alam meningkat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah</li><li>- Kurangnya pendanaan dan infrastruktur adaptasi perubahan iklim</li></ul>
8.	Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya standar keselamatan pada moda transportasi laut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulasi keselamatan yang belum memadai</li><li>- Keterbatasan SDM dan fasilitas pendukung keselamatan transportasi</li></ul>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya pengawasan terhadap aturan transportasi</li></ul>	
9.	Kesadaran Lingkungan Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan</li><li>- Sampah dan limbah dikelola tidak sesuai prosedur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimnya edukasi dan kampanye lingkungan</li><li>- Keterbatasan program pemberdayaan masyarakat terkait lingkungan hidup</li></ul>
10.	Keterbatasan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang terbatas</li><li>- Pendanaan kegiatan lingkungan hidup terbatas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketergantungan pada alokasi pusat/provinsi</li><li>- Pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah</li></ul>

Tabel di atas ini dapat digunakan untuk mempermudah analisis untuk menentukan prioritas pembangunan daerah berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan kemampuan penanganan.

## 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode lima kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

**“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahterah”**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif;
4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdapat pada Misi Ke-2 (kedua) yaitu “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan” dan Misi Ke-3 (ketiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif”.

## **2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas dengan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

### **2.7.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, sangat perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Rencana



Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dengan dipandu Visi : “Transportasi Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan uraian misi:

1. Mewujudkan Transportasi Nasional yang berkelanjutan.
2. Melakukan transformasi struktural dalam penyelenggaraan transportasi Nasional.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Perhubungan, tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan nilai tambah sektor transportasi dalam mendukung pencapaian sarana Nasional;
2. Mewujudkan Transportasi Nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing;
3. Mengembangkan kebijakan dan sumber daya manusia transportasi yang berkualitas;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Sasaran Strategis

1. Menurunkan biaya logistik Nasional;
2. Meningkatkan konektivitas dan pelayanan Transportasi Nasional;
3. Meningkatkan keselamatan Transportasi;
4. Meningkatkan kualitas kebijakan dan sumberdaya manusia Transportasi;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan.



### **2.7.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau**

Selain itu, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas juga perlu memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dengan dipandu Visi : “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai hunian yang nyaman untuk berinvestasi dan bermukim”, dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya lingkungan kerja dan usaha yang bersih, aman, dan nyaman.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan pesisir beserta sumber daya lainnya.
3. Meningkatkan peran serta institusi lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengendalian dan penegakan hukum.

### **2.7.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, pada pasal 6 menyebutkan bahwa Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

1. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;



2. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
3. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar;
4. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang disusun telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Telaahan terhadap KLHS membantu Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memastikan bahwa Renstra tidak hanya berfokus pada



peningkatan pelayanan tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas.

## 2.8 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dinamis, identifikasi isu-isu strategis menjadi langkah penting untuk memastikan arah kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan karakteristik geografisnya yang unik dan potensi sumber daya alam yang melimpah, memerlukan prioritas pembangunan yang terintegrasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis yang diangkat mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengendalian pencemaran lingkungan, hingga peningkatan konektivitas wilayah. Dengan menetapkan isu-isu ini sebagai prioritas, pemerintah daerah dapat merancang program dan kegiatan yang tidak hanya responsif terhadap permasalahan yang ada tetapi juga memberikan dampak nyata dalam lima tahun ke depan. Bagian ini menguraikan isu-isu strategis tersebut sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

### 1. Peningkatan Infrastruktur Melalui Pelabuhan Penyeberangan meningkatkan Konektivitas Antarwilayah

Aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah merupakan hal yang krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Infrastruktur transportasi yang masih terbatas, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menjadi salah satu kendala utama dalam



meningkatkan mobilitas penduduk dan distribusi barang. Prioritas pada peningkatan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi sangat penting. Pengembangan transportasi yang terintegrasi dan berbasis pada potensi daerah dapat meningkatkan efisiensi dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

## 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, khususnya di sektor perikanan dan ekosistem pesisir. Namun, adanya kegiatan pembangunan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti degradasi terumbu karang, abrasi pantai, dan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih. Program konservasi, rehabilitasi ekosistem, dan pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah.

## 3. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim semakin nyata, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem. Kabupaten Kepulauan Anambas perlu segera mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi untuk mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, pengelolaan kawasan pesisir yang adaptif, serta penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan akan membantu daerah ini beradaptasi terhadap perubahan iklim yang terus berlangsung.



#### 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian, memberikan potensi besar untuk perekonomian daerah. Namun, tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam kelestarian ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih terencana, seperti pembatasan penangkapan ikan berlebihan, pengelolaan kawasan konservasi, serta peningkatan regulasi terhadap sektor-sektor yang berisiko merusak alam. Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam harus didorong tanpa mengorbankan keberlanjutan.

#### 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM menjadi kendala dalam memajukan berbagai sektor pembangunan. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, baik di sektor perhubungan maupun lingkungan hidup, sangat penting untuk mendukung keberhasilan berbagai program strategis. Pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan daerah, serta peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, akan membantu menciptakan SDM yang lebih produktif dan mampu menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

#### 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Namun, masih banyak tantangan terkait kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Isu ini menjadi prioritas untuk



diatasi melalui peningkatan edukasi lingkungan, kampanye pengurangan sampah, serta pelibatan masyarakat dalam program konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Program berbasis masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan dan dampak positif terhadap lingkungan.

#### 7. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan dan Pariwisata Ramah Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama wisata bahari. Namun, pengembangan pariwisata yang tidak terkendali dapat menambah beban lingkungan, seperti pencemaran laut dan kerusakan terumbu karang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas, dengan melibatkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata dan infrastruktur pendukungnya. Peningkatan promosi pariwisata yang berbasis pada pelestarian alam akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan daerah.

#### 8. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pembangunan Berkelanjutan

Selain transportasi, sektor infrastruktur lainnya seperti penyediaan energi terbarukan, air bersih, dan pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berbasis pada sumber daya lokal dapat membantu daerah mengurangi ketergantungan pada energi fosil, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Proyek-proyek infrastruktur yang memperhatikan dampak lingkungan dan efisiensi energi harus menjadi prioritas dalam lima tahun ke depan.

#### 9. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan



Untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan, diperlukan kelembagaan yang kuat dan kapasitas pemerintahan yang mumpuni. Isu ini mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, perbaikan sistem administrasi pemerintahan, serta penguatan kapasitas aparat di bidang perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup perlu memperkuat kapasitasnya untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Isu-isu strategis di atas harus diprioritaskan dalam lima tahun ke depan, dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara sektor perhubungan, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menangani isu-isu ini akan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas.



### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas, diperlukan rumusan tujuan dan sasaran strategis yang menjadi arah dan fokus dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Tujuan dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan dan peluang yang ada, sementara sasaran memberikan gambaran konkret mengenai hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terukur dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam dokumen rencana strategis ini juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator ini berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran secara berkala, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dari program-program yang dijalankan. Berikut ini adalah tabel tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

VISI	MISI DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja Kunci	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA	MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan Sasaran RPJMD : Meningkatkan Konektivitas Transportasi Publik	Meningkatkan Konektivitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	IKU.1			Rasio Konektivitas	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.74	Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029	
						IKK.1	Konektivitas Darat	0.27	0.32	0.37	0.43	0.48	0.53	Indikator Sasaran Renstra 2025-2029	
						IKK.2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00		
							IKK.3	Konektivitas Laut	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	
	MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan Sasaran RPJMD : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan RTH		IKU.2	IKD.1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84.52	84.89	85.27	85.64	86.02	86.39	Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029
							IKK.4	Indeks Kualitas Air	60.00	60.10	60.20	60.30	60.40	60.50	Indikator Sasaran Renstra 2025-2029
							IKK.5	Indeks Kualitas Udara	94.45	94.55	94.65	94.75	94.85	94.95	
							IKK.6	Persentase RTH	47.38	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	
							Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengumpulan Sampah			IKK.7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	52.20	54.00	55.00	56.00
			IKD.2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	14.77	17.53		20.28	23.03	25.78	28.53				
					IKD.3		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	56.08	58.83	61.57	64.32	67.06	69.81		
	MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan Sasaran RPJMD : Meningkatkan Ketangguhan Daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			IKU.3	IKD.4		Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	0.04	0.09	0.14	0.20	0.25	0.29	Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029
IKU.4					IKD.5		Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	0.10	0.12	0.14	0.17	0.19	0.22		
MISI 3 : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif Sasaran RPJMD : Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas		IKU.5			Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	BB	Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029	
								66.90	67.02	67.40	68.44	69.48	70.52		



Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan tujuan strategis yang berfokus pada tata kelola pemerintahan, pengendalian lingkungan hidup, dan peningkatan layanan transportasi. Tujuan ini dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis yang dihadapi daerah, sekaligus mendukung pencapaian visi jangka panjang kabupaten. Setiap tujuan dilengkapi dengan sasaran yang spesifik serta strategi dan kebijakan terarah, guna memastikan pelaksanaan program yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sinergi antar perangkat daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan tujuan tersebut. Dengan mengedepankan pendekatan akuntabilitas, inovasi, dan kolaborasi, kebijakan yang disusun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan memperbaiki konektivitas transportasi. Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas:

**Tabel. 3.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b> : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahterah				
<b>Misi</b> : Mewujudkan Pelayanan prima melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi</li> </ul>



<b>Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahterah</b>				
<b>Misi : Mewujudkan Pelayanan prima melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kapasitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan dan sertifikasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyederhanaan proses birokrasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan lintas sektor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas</li></ul>



<b>Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahterah</b>				
<b>Misi : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan</b>				
<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan RTH	<ul style="list-style-type: none"><li>Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui edukasi dan pemberdayaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan program mitigasi pencemaran berbasis teknologi ramah lingkungan</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Mengintegrasikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam semua sektor pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan</li></ul>
2	Meningkatkan Konektivitas Perhubungan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap standar keselamatan transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan efisiensi pelayanan lalu lintas melalui digitalisasi dan modernisasi sistem manajemen transportasi</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>Mengoptimalkan koordinasi antarinstansi terkait untuk meningkatkan pelayanan transportasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas SDM di sektor transportasi melalui pelatihan dan sertifikasi</li></ul>



Tabel ini memberikan gambaran terstruktur mengenai langkah strategis dan arah kebijakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dirancang memastikan sinergi antara tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan, dan layanan transportasi yang lebih baik.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang terukur serta pendanaan yang memadai. Rencana program dan kegiatan dirancang untuk memberikan solusi atas permasalahan prioritas dan isu strategis yang dihadapi, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat, menjadi dasar dalam pelaksanaan rencana ini guna memastikan tercapainya manfaat yang optimal bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **4.1 Uraian Program Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan dapat terwujud sinergi antara tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan, dan layanan transportasi yang lebih baik.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar-unit pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang efisien dan efektif.



2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas serta pelayanan angkutan jalan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi darat yang lebih baik.
3. Program Pengelolaan Pelayaran  
Program ini berfokus pada pengembangan dan pengelolaan pelayaran yang aman dan efisien untuk mendukung konektivitas wilayah kepulauan, termasuk optimalisasi pelabuhan dan rute transportasi laut.
4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup  
Program ini dirancang untuk menyusun kebijakan dan rencana pengelolaan lingkungan yang berbasis data dan analisis strategis, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Program ini bertujuan untuk meminimalkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan teknologi pengendalian pencemaran.
6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
Program ini mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui upaya konservasi, rehabilitasi ekosistem, serta pengelolaan kawasan yang menjadi habitat spesies langka.
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)  
Program ini memastikan pengelolaan bahan berbahaya dan limbah B3 dilakukan sesuai standar yang aman bagi lingkungan dan kesehatan, termasuk pengawasan terhadap pengelolaannya.



8. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  
Program ini berfokus pada pemberian dan pengawasan izin lingkungan untuk memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan regulasi dan standar lingkungan yang berlaku.
9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi signifikan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Program ini menyediakan mekanisme yang responsif dan transparan untuk menangani pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan, sehingga dapat mendorong penyelesaian masalah secara efektif.
12. Program Pengelolaan Persampahan  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengurangan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan yang lebih efektif, guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.



#### **4.2 Uraian Kegiatan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah daftar Kegiatan-Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
8. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Daerah Kabupaten/Kota
11. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha



13. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
15. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
16. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
17. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
18. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
19. Penyimpanan Sementara Limbah B3
20. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
24. Pengelolaan Sampah.

Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KET	
1	2	3	4	5	6	7		8	
<b>MISI 3 :</b> Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif <b>Sasaran RPJMD :</b> Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel</b>				Nilai SAKIP				
		<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas</b>			Nilai SAKIP				
			<b>Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>2.15.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Program
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
							2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
							2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
							2.15.01.2.01.0008	Penyelenggara Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
							2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengeumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
					Terpenuhinya Layanan Administrasi Keuangan	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
							2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
							2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan
					Terlaksananya layanan Administrasi BMD	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi BMD Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
							2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
					Terlaksananya layanan Administrasi Kepegawaian	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
							2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan
							2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan
					Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
						2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan	
						2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan	
						2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan	
						2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan	
						2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan	
						2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan	

				<b>Terlaksananya layanan Pengadaan BMD Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
						2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Sub Kegiatan
				<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
						2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
						2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan

<b>MISI 3 :</b> Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif <b>Sasaran RPJMD :</b> Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	<b>UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI</b>							
	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel</b>				Nilai SAKIP			
		<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas</b>			Nilai SAKIP			
			<b>Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2.15.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Program
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
						2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2.15.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kegiatan
						2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.15.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan
						2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
						2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan
						2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
					2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	
					2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	

<b>MISI 3 :</b> Meningkatkan Pelayanan Prima Melalui penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif <b>Sasaran RPJMD :</b> Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	<b>UPT PENGELOLAAN SAMPAH</b>							
	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel</b>				Nilai SAKIP			
		<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas</b>			Nilai SAKIP			
			<b>Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.15.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Program
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kegiatan
						2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.11.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kegiatan</b>
						2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan
						2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan
			Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan	
					2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan	
					2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kegiatan	
					2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan	
					2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan	

MISI 2: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan	Meningkatkan Konektivitas Perhubungan				Rasio Konektivitas Kabupaten			
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan				Konektivitas Darat			
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal			
					Konektivitas Laut			
			Meningkatnya Kualitas layanan Transportasi Darat		Konektivitas Darat	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Program
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi Ideal				
				Tersedianya sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan
						2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu lintas	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan
					2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	
			Tersedianya Angkutan umum	Persentase Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	
					2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	
					2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	

		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut		Konektivitas Laut	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Program
			Terlaksananya penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan	<b>Persentase tersedianya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan/ Kota</b>	<b>2.15.03.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan/ Kota</b>	Kegiatan
					2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan
			Terlaksananya penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan	<b>Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.15.03.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kegiatan
					2.15.03.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan
			Terlaksananya penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai domisili badan usaha	<b>Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha</b>	<b>2.15.03.2.05</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha</b>	Kegiatan
					2.15.03.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan
			Tersedianya sarana dan Prasarana serta angkutan laut	<b>Persentase Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Kegiatan
					2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Sub Kegiatan
					2.15.03.2.12.0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/ kota pada jaringan jalan kabupaten/ kota	Sub Kegiatan

<b>MISI 2 :</b> Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan <b>Sasaran RPJMD :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan RTH			Indeks Kualitas Air			
					Indeks Kualitas Udara			
					Persentase RTH			
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Program
				Tersedianya Dokumen perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten /Kota	Sub Kegiatan
				Tersedianya Dokumen Kajian Strategis Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sub Kegiatan
						2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Sub Kegiatan
			Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Udara	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Program
				Tersusunnya Dokumen aksi pemantauan kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Sub Kegiatan
						2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Sub Kegiatan
						2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sub Kegiatan
						2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sub Kegiatan
						2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Sub Kegiatan
					2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan	
					2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Sub Kegiatan	
					2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan	
			Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	
					2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Sub Kegiatan	

<b>MISI 2 :</b> Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan <b>Sasaran RPJMD :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Meningkatnya kualitas pengelolaan Keekaragaman Hayati		Persentase RTH (ruang terbuka hijau)	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Program	
				Tersusunnya Dokumen aksi Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Persentase terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kegiatan	
							2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Sub Kegiatan
							2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub Kegiatan
				Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang terkelola	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Program
					Tersedianya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Diawasi	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan
							2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Program
					Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase Penyuluh lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Program
					Terlaksananya penghargaan sekolah Adiwiyata	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
							2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan
							2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Program
					Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan	

<b>MISI 2 :</b> Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata dan Berkelanjutan <b>Sasaran RPJMD :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana Lingkungan Hidup		Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Program
				Terselesainya Pengaduan Masyarakat	Persentase Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kegiatan
						2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengumpulan Sampah			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
					Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Program
					Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah			
					Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah			
				Terlaksananya pengelolaan sampah	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kegiatan
						2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sub Kegiatan
						2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
						2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Sub Kegiatan
						2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sub Kegiatan
						2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sub Kegiatan
						2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Sub Kegiatan
					2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sub Kegiatan	
					2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Sub Kegiatan	
					2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah, TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sub Kegiatan	
					2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Sub Kegiatan	
					2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Kegiatan	
					2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sub Kegiatan	

### 4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Tabel.4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>															
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan / Jumlah total kegiatan (7)*100%	%	100%	100	100	14,774,562,732	100	14,922,308,359	100	15,071,531,443	100	15,222,246,757	100	15,374,469,225
		Indeks Kepuasan Masyarakat	IHM-nilai rata-rata x 25 (PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017)	%	85.7%	87		88		89		90		91		
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
	Terusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi, dan penyelenggaraan validasi data dan pelaksanaan data statistik sektoral/jumlah rencana dan target dokumen yang dilaksanakan *100 %	%	80%	80	22,000,000	80	22,220,000	80	22,442,200	80	22,666,622	80	22,893,288	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	10,000,000	5	10,100,000	5	10,201,000	5	10,303,010	5	10,406,040	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3 Laporan	3	10,000,000	3	10,100,000	3	10,201,000	3	10,303,010	3	10,406,040	
2.15.01.2.01.0008	Penyelenggara Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	1	1,000,000	1	1,010,000	1	1,020,100	1	1,030,301	1	1,040,604	
2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	data	-	1	1,000,000	1	1,010,000	1	1,020,100	1	1,030,301	1	1,040,604	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun /jumlah target layanan yang dilaksanakan*100%	%	95%	95	14,133,870,840	95	14,275,209,548	95	14,417,961,644	95	14,562,141,260	95	14,707,762,673	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	orang/ bulan	34 orang	214	14,023,870,840	217	14,164,109,548	220	14,305,750,644	223	14,448,808,150	226	14,593,296,232	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium PPTK	Dokumen	1 Dokumen	1	110,000,000.00	1	111,100,000	1	112,211,000	1	113,333,110	1	114,466,441	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>															
	Terlaksananya pelayanan administrasi BMD perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi BMD yang diberikan / Jumlah rencana pelayanan BMD*100%	%	-	80	13,000,000	80	13,130,000	80	13,261,300	80	13,393,913	80	13,527,852	
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	-	1	13,000,000	1	13,130,000	1	13,261,300	1	13,393,913	1	13,527,852	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															
	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun /Jumlah rencana layanan*100%	%	-	80	60,000,000	80	60,600,000	80	61,206,000	80	61,818,060	80	62,436,241	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	5	30,000,000	5	30,300,000	5	30,603,000	5	30,909,030	5	31,218,120	

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan bahan perkantoran, (kebutuhan komponen listrik, peralatan kantor, logistik, bahan cetak, mainan dan perjalanan dinas/ jumlah rencana atau target pelayanan*100%	%	80%	80	239,141,172	80	241,532,584	80	243,947,910	80	246,387,389	80	248,851,263
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket	3 Paket	2	5,420,985	2	5,475,195	2	5,529,947	2	5,585,246	2	5,641,099
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	3 Paket	2	30,000,000	2	30,300,000	2	30,603,000	2	30,909,030	2	31,218,120
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket	2 Paket	2	35,000,000	2	35,350,000	2	35,703,500	2	36,060,535	2	36,421,140
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Paket	2 Paket	2	30,970,187	2	31,279,889	2	31,592,688	2	31,908,615	2	32,227,701
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	laporan	2 Laporan	2	31,750,000	2	32,067,500	2	32,388,175	2	32,712,057	2	33,039,177
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	laporan	2 Laporan	2	106,000,000	2	107,060,000	2	108,130,600	2	109,211,906	2	110,304,025
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana atau target kebutuhan BMD*100%	%	80%	80	100,000,000	80	101,000,000	80	102,010,000	80	103,030,100	80	104,060,401
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Unit	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Unit	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Paket	-	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,402,000	1	20,606,020	1	20,812,080
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Unit	-	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,402,000	1	20,606,020	1	20,812,080
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Tersedianya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah/ jumlah rencana atau target seluruh kebutuhan jasa*100%	%	80%	80	133,480,920	80	134,815,729	80	136,163,886	80	137,525,525	80	138,900,781
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2 Laporan	2	31,527,920	2	31,843,199	2	32,161,631	2	32,483,248	2	32,808,080
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	laporan	2 Laporan	2	68,686,000	2	69,372,860	2	70,066,589	2	70,767,254	2	71,474,927
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	laporan	2 Laporan	2	13,267,000	2	13,399,670	2	13,533,667	2	13,669,003	2	13,805,693
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	laporan	1 Laporan	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,402,000	1	20,606,020	1	20,812,080
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi yang terpelihara baik (kendaraan dinas dan gedung kantor/jumlah target pemeliharaan*100%	%	80%	80	73,069,800	80	73,800,498	80	74,538,503	80	75,283,888	80	76,036,727
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8 Unit	8	48,560,000	8	49,045,600	8	49,536,056	8	50,031,417	8	50,531,731
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1 Unit	1	24,509,800	1	24,754,898	1	25,002,447	1	25,252,471	1	25,504,996

01.1	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI															
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (4)*100%	%	100%	100	430,713,767	100	435,020,905	100	439,371,114	100	443,764,825	100	448,202,473	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan bahan perkantoran, (kebutuhan komponen listrik, peralatan kantor, logistik, bahan cetak, mainin dan perjalanan dinas/ jumlah target pelayanan*100%	%	80%	80	208,313,479	80	210,396,614	80	212,500,580	80	214,625,586	80	216,771,842	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Paket	2 Paket	2	2,500,000	2	2,525,000	2	2,550,250	2	2,575,753	2	2,601,510	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	2 Paket	2	5,000,000	2	5,050,000	2	5,100,500	2	5,151,505	2	5,203,020	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Paket	2 Paket	2	1,783,000	2	1,800,830	2	1,818,838	2	1,837,027	2	1,855,397	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket	3 Paket	3	120,700,000	3	121,907,000	3	123,126,070	3	124,357,331	3	125,600,904	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Paket	3 Paket	3	57,360,479	3	57,934,084	3	58,513,425	3	59,098,559	3	59,689,544	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2 Laporan	2	20,970,000	2	21,179,700	2	21,391,497	2	21,605,412	2	21,821,466	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana atau target kebutuhan BMD*100%	%	-	80	85,000,000	80	85,850,000	80	86,708,500	80	87,575,585	80	88,451,341	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	unit	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Paket	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	unit	-	1	25,000,000	1	25,250,000	1	25,502,500	1	25,757,525	1	26,015,100	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah/ jumlah rencana seluruh kebutuhan jasa*100%	%	80%	80	56,960,288	80	57,529,891	80	58,105,190	80	58,686,242	80	59,273,104	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	3 Laporan	3	9,360,288	3	9,453,891	3	9,548,430	3	9,643,914	3	9,740,353	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3 Laporan	3	47,600,000	3	48,076,000	3	48,556,760	3	49,042,328	3	49,532,751	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi yang terpelihara baik (kendaraan dinas, peralatan dan mesin serta gedung kantor/jumlah target pemeliharaan*100%	%	80%	80	80,440,000	80	81,244,400	80	82,056,844	80	82,877,412	80	83,706,187	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2 Unit	2	9,780,000	2	9,877,800	2	9,976,578	2	10,076,344	2	10,177,107	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	3 Unit	3	40,660,000	3	41,066,600	3	41,477,266	3	41,892,039	3	42,310,959	
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120	

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat																	
1.Konektivitas Darat		(Jumlah jenis perlengkapan jalan yang telah terpasang + Jumlah jenis perlengkapan jalan yang dibutuhkan secara ideal) × 100%		%	N/A	0.32	1,023,020,663	0.37	1,414,530,568	0.43	1,872,234,023	0.48	2,210,860,617	0.53	3,068,571,248		
2.Persentase Kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal						22		24		26		28		30			
<b>2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>																	
Tersedianya perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis dan keselamatan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota.		Persentase Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		(Jumlah perlengkapan jalan yang memenuhi standar teknis + Jumlah total perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia) × 100%		%	80%	80	673,477,198	80	910,032,756	80	1,181,286,430	80	1,299,415,073	80	1,429,356,581
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		Unit	5 Unit	5	115,420,000	5	126,962,000	5	228,531,600	5	251,384,760	5	276,523,236
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Unit	5 Unit	5	276,858,970	5	412,137,414	5	502,765,354	5	553,041,890	5	608,346,079
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Unit	5 Unit	5	127,160,000	5	139,876,000	5	195,826,400	5	215,409,040	5	236,949,944
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		Unit	5 Unit	5	154,038,228	5	231,057,342	5	254,163,076	5	279,579,384	5	307,537,322
<b>2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>																	
Terseleenggaranya manajemen dan rekeyasa lalu lintas yang efektif dan berkelanjutan		Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		[(Jumlah titik kemacetan yang ditangani dan menunjukkan perbaikan + Total titik kemacetan yang menjadi target)] × 100%		%	80%	80	121,922,000	80	134,114,200	80	147,525,620	80	162,278,182	80	169,281,877
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan	1 Laporan	1	38,510,000	1	42,361,000	1	46,597,100	1	51,256,810	1	53,819,651
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan		Dokumen	2 Dokumen	2	55,162,000	2	60,678,200	2	66,746,020	2	73,420,622	2	76,357,447
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		laporan	1 Laporan	1	28,250,000	1	31,075,000	1	34,182,500	1	37,600,750	1	39,104,780
<b>2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
Tersedianya layanan angkutan umum yang aman, terjangkau, andal, dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan/atau distribusi barang di wilayah kabupaten/kota.		Persentase Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah trayek/armada angkutan umum antar kota dalam daerah kabupaten/kota yang telah beroperasi × 100		%	80%	80	227,621,465	80	370,383,612	80	543,421,973	80	749,167,362	80	1,469,932,790
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang tersedia		laporan	1 Laporan	1	27,621,465	1	30,383,612	1	33,421,973	1	36,764,170	1	38,602,378
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		Unit	1 Unit	1	200,000,000	1	340,000,000	2	510,000,000	2	712,403,192	3	1,431,330,411

2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Laut																
Konektivitas Laut																
(Jumlah pelabuhan yang terhubung secara aktif + Jumlah total pelabuhan yang ada) × 100%																
%																
0.31%																
0.35																
11,308,674,021																
0.37																
18,233,878,434																
0.39																
27,400,017,650																
0.41																
31,102,387,884																
0.43																
34,618,700,378																
<b>2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota</b>																
Terbitnya izin usaha angkutan laut secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																
Persentase tersedianya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota																
(Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan + Jumlah total izin yang diterbitkan) × 100%																
%																
-																
80																
40,000,000																
80																
44,000,000																
80																
48,400,000																
80																
53,240,000																
80																
58,564,000																
2.15.03.2.01.0001																
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Dokumen																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
2.15.03.2.01.0002																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota																
laporan																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
<b>2.15.03.2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																
Terbitnya izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																
Persentase terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
(Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur dan memenuhi persyaratan + Jumlah total izin yang diterbitkan) × 100%																
%																
-																
80																
40,000,000																
80																
44,000,000																
80																
48,400,000																
80																
53,240,000																
80																
58,564,000																
2.15.03.2.02.0001																
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Dokumen																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
2.15.03.2.02.0002																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota																
laporan																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
<b>2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha</b>																
Terbitnya izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																
Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha																
(Jumlah izin yang diterbitkan sesuai prosedur dan persyaratan + Jumlah total izin yang diterbitkan) × 100%																
%																
-																
80																
40,000,000																
80																
44,000,000																
80																
48,400,000																
80																
53,240,000																
80																
58,564,000																
2.15.03.2.05.0001																
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
Dokumen																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
2.15.03.2.05.0002																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																
Laporan																
-																
2																
20,000,000																
2																
22,000,000																
2																
24,200,000																
2																
26,620,000																
2																
29,282,000																
<b>2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>																
Terbangunnya pelabuhan pengumpan lokal yang layak fungsi serta terbitnya izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.																
Persentase Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
(Jumlah pelabuhan yang telah memiliki izin pembangunan dan izin pengoperasian + Jumlah total pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun) × 100%																
%																
80%																
80																
11,188,674,021																
80																
18,101,878,434																
80																
27,254,817,650																
80																
30,942,667,884																
80																
34,443,008,378																
2.15.03.2.12.0002																
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun																
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun																
Unit																
3 unit																
3																
10,888,674,021																
3																
17,421,878,434																
4																
26,132,817,650																
4																
29,530,083,945																
5																
32,778,393,179																
2.15.03.2.12.0003																
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara																
Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara																
Unit																
1 Unit																
1																
100,000,000																
2																
250,000,000																
3																
425,000,000																
4																
540,183,939																
5																
635,183,199																
2.15.03.2.12.0004																
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Laporan																
-																
2																
50,000,000																
3																
90,000,000																
4																
153,000,000																
5																
183,600,000																
6																
216,648,000																
2.15.03.2.12.0005																
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal																
Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia																
Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia																
Unit																
1 Unit																
1																
100,000,000																
2																
250,000,000																
3																
400,000,000																
4																
516,000,000																
5																
608,880,000																
2.15.03.2.12.0006																
Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota																
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota																
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota																
Laporan																
-																
4																
50,000,000																
5																
90,000,000																
6																
144,000,000																
7																
172,800,000																
8																
203,904,000																

2.11	URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			-	-	1,612,973,953	1,730,603,454	1,978,248,621	2,141,527,866	2,259,638,580					
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah total rekomendasi dalam KLHS) × 100%	%	15	20	55,000,000	25	55,550,000	35	89,205,500	45	103,076,555	50	57,233,221
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota														
	Tersusunnya dokumen RPPLH yang komprehensif, sah secara hukum, dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan di daerah	Persentase Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun	(Tahapan penyusunan yang telah diselesaikan ÷ Total tahapan yang direncanakan) × 100%	%	-	0	-	0	-	80	33,100,000	0	-	0	-
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/kota dan mengkomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	-	0	-	0	-	1	33,100,000	0	-	0	-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														
	Terselenggaranya kajian lingkungan hidup strategis yang mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui integrasi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen rencana pembangunan daerah.	Persentase Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan	Jumlah dokumen KLHS yang telah disusun dan mendapatkan berita acara validasi dari Kementerian/Lembaga atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Jumlah total dokumen perencanaan strategis yang diwajibkan memiliki KLHS) × 100%	%	-	80	55,000,000	80	55,550,000	80	56,105,500	80	103,076,555	80	57,233,221
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	1	46,410,000	0	-
2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	-	1	55,000,000	2	55,550,000	3	56,105,500	4	56,666,555	5	57,233,221
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.Indeks Kualitas Air	100 - (Skor pencemar total ÷ Skor maksimum) × 100	%	60	60.1	180,000,000	60.2	198,000,000	60.3	217,800,000	60.4	239,580,000	60.5	263,538,000
		2.Indeks Kualitas Udara			94.45	94.55		94.65		94.75		94.85		94.95	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota														
	Terlaksananya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten/kota.	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah total kegiatan (sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan/atau penegakan hukum) yang telah dilakukan dalam periode tertentu/Jumlah total kegiatan *100	%	-	80	160,000,000	80	176,000,000	80	193,600,000	80	212,960,000	80	234,256,000
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	-	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000
2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000

2.11.03.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>														
	Terlaksananya upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten/kota.	Persentase Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	(Jumlah kasus pencemaran/kerusakan yang ditangani sesuai standar waktu respons ÷ Jumlah total kasus yang terjadi) × 100%	%	-	80	20,000,000	80	22,000,000	80	24,200,000	80	26,620,000	80	29,282,000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang terlaksana	Laporan	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>														
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	(Luas Ruang Terbuka Hijau ÷ Luas Wilayah Perkotaan) × 100%	%	47.38%	48	100,350,000	49	110,385,000	50	156,777,499	51	172,455,249	52	189,700,775
2.11.04.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>														
	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi serta karakteristik lokal wilayah kabupaten/kota.	Persentase terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup	(Jumlah kawasan kehati yang dikelola ÷ Jumlah total kawasan kehati yang teridentifikasi) × 100%	%	80%	80	100,350,000	80	110,385,000	80	156,777,499	80	172,455,249	80	189,700,775
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang tersusun	Dokumen	-	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,199,999	1	26,619,999	1	29,282,000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	0.9 Ha	0.9	80,350,000	1	88,385,000	1.1	132,577,500	1.2	145,835,250	1.3	160,418,775
2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>														
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	(Jumlah limbah B3 yang dikelola dengan benar ÷ Jumlah total limbah B3 yang dihasilkan) × 100%	%	52.20%	54	25,000,000	55	27,500,000	56	30,250,000	57	33,275,000	58	36,602,500
2.11.05.2.01	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>														
	Terselenggaranya fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 yang memenuhi standar teknis, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten/kota.	Persentase terlaksananya Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Diawasi	Jumlah fasilitas yang memenuhi standar teknis dan keamanan ÷ Jumlah total fasilitas yang ada) × 100%	%	-	80	25,000,000	80	27,500,000	80	30,250,000	80	33,275,000	80	36,602,500
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 yang tersedia	laporan	-	2	25,000,000	2	27,500,000	2	30,250,000	2	33,275,000	2	36,602,500
2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>														
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH	(Jumlah penanggung jawab usaha/kegiatan yang taat ÷ Jumlah total penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi) × 100%	%	80%	96.5	143,054,940	96.7	157,360,434	98	173,096,477	99	190,406,125	100	209,446,738
2.11.06.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>														
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan secara sistematis, konsisten, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepatuhan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH.	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang diawasi ÷ Jumlah total pelaku usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan/atau izin PPLH) × 100%	%	80%	80	143,054,940	80	157,360,434	80	173,096,477	80	190,406,125	80	209,446,738
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	3 Badan Usaha	3	143,054,940	3	157,360,434	4	173,096,477	4	190,406,125	5	209,446,738

<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>																	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	(Jumlah penyuluh lingkungan yang mengikuti peningkatan kompetensi + Jumlah total penyuluh lingkungan yang terdapat) × 100%	%	65%	85	91,257,360	90	100,383,096	95	110,421,406	98	121,463,546	100	133,609,901			
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
	Meningkatnya kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah lembaga yang mengimplementasikan pengetahuan/keterampilan dalam kegiatan lingkungan + Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan) × 100%	%	80%	80	91,257,360	80	100,383,096	80	110,421,406	80	121,463,546	80	133,609,901			
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang terlaksana	Dokumen	3 Dokumen	3	56,257,360	3	61,883,096	3	68,071,406	3	74,878,546	3	82,366,401			
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	-	20	35,000,000	20	38,500,000	20	42,350,000	20	46,585,000	20	51,243,500			
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>																	
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah masyarakat/kelompok yang terlibat aktif dalam kegiatan PPLH + Jumlah total sasaran potensial partisipasi) × 100%	%	74	92	25,000,000	95	27,500,000	98	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500			
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
	terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada individu, kelompok, lembaga, atau dunia usaha yang telah berkontribusi secara nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota.	Persentase Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah penerima penghargaan + Jumlah total peserta yang mengikuti seleksi) × 100%	%	74	80	25,000,000	80	27,500,000	80	30,250,000	80	33,275,000	80	36,602,500			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3	5	25,000,000	5	27,500,000	6	30,250,000	6	33,275,000	7	36,602,500			
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	(Jumlah sengketa/kasus yang diselesaikan + Jumlah total sengketa/kasus yang ditangani) × 100%	%	100	100	25,000,000	100	27,500,000	100	30,250,000	100	33,275,000	100	36,602,500			
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>																	
	terselesainya pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup secara cepat, tepat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan dalam jangka waktu sesuai SOP + Jumlah total pengaduan yang diselesaikan) × 100%	%	100	80	25,000,000	80	27,500,000	80	30,250,000	80	33,275,000	80	36,602,500			
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	2	2	25,000,000	2	27,500,000	2	30,250,000	2	33,275,000	2	36,602,500			
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>																	
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	(Σ Skor dari seluruh aspek pengelolaan sampah + Skor maksimum) × 100	%	52	54	538,112,826	55	591,924,109	56	701,351,916	57	771,487,110	58	848,635,821			
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		6.21	17.53	20.28										23.03	25.78	28.53
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		55.96%	58.83	61.57										64.32	67.06	69.81
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>																	
	terlaksananya sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah kabupaten/kota.	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sampah	(Jumlah sampah yang dikelola + Jumlah total timbulan sampah) × 100%	%	80%	80	538,112,826	80	591,924,109	80	701,351,916	80	771,487,110	80	848,635,821			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000			

2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	2	20,000,000	3	22,000,000	4	24,200,000	5	26,620,000	6	29,282,000
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	-	2	20,000,000	2	22,000,000	2	24,200,000	2	26,620,000	2	29,282,000
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dokumen	-	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	-	10	20,000,000	12	22,000,000	14	24,200,000	16	26,620,000	18	29,282,000
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	12.5 Ton	13	114,171,360	14	125,588,496	15	188,382,743	16	207,221,017	17	227,943,119
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	8 Unit	8	223,941,466	8	246,335,613	8	270,969,173	8	298,066,090	8	327,872,699
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	-	30	20,000,000	31	22,000,000	32	24,200,000	33	26,620,000	34	29,282,000
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah, TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	-	2	20,000,000	3	22,000,000	4	24,200,000	5	26,620,000	6	29,282,000
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	-	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	1	26,620,000	1	29,282,000
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	-	2	20,000,000	4	22,000,000	6	24,200,000	8	26,620,000	10	29,282,000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	-	15	20,000,000	16	22,000,000	17	24,200,000	18	26,620,000	19	29,282,000
<b>01.2</b>	<b>UPT PENGELOLAAN SAMPAH</b>						<b>430,198,827</b>		<b>434,500,815</b>		<b>438,845,823</b>		<b>443,234,282</b>		<b>447,666,624</b>
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total (4) kegiatan*100%	%	100%	100	430,198,827	100	434,500,815	100	438,845,823	100	443,234,282	100	447,666,624
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang mencakup penyediaan bahan perkantoran, pelaksanaan rapat, aktivitas lapangan, pelayanan tamu, perjalanan dinas, dan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan bahan perkantoran, (kebutuhan komponen listrik, peralatan kantor, logistik, bahan cetak, material dan perjalanan dinas/ jumlah target pelayanan*100%	%	80%	80	102,180,000	80	103,201,800	80	104,233,818	80	105,276,156	80	106,328,918
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Paket	2 Paket	2	1,500,000	2	1,515,000	2	1,530,150	2	1,545,452	2	1,560,906
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	3 Paket	3	15,000,000	3	15,150,000	3	15,301,500	3	15,454,515	3	15,609,060
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	23,580,000	2	23,815,800	2	24,053,958	2	24,294,498	2	24,537,443
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	15,000,000	2	15,150,000	2	15,301,500	2	15,454,515	2	15,609,060
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	9,700,000	2	9,797,000	2	9,894,970	2	9,993,920	2	10,093,859
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kali Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2 Laporan	2	37,400,000	2	37,774,000	2	38,151,740	2	38,533,257	2	38,918,590

<b>2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
	Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/jumlah rencana atau target kebutuhan EMD (3) sub kegiatan*100%	%	-	80	70,000,000	80	70,700,000	80	71,407,000	80	72,121,070	80	72,842,281
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Unit	-	1	30,000,000	1	30,300,000	1	30,603,000	1	30,909,030	1	31,218,120
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	Paket	-	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,402,000	1	20,606,020	1	20,812,080
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	Unit	-	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,402,000	1	20,606,020	1	20,812,080
<b>2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	Tersedianya layanan jasa administrasi perkantoran dan langganan operasional yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah/ jumlah rencana seluruh kebutuhan jasa*100%	%	80%	80	7,884,860	80	7,963,709	80	8,043,346	80	8,123,779	80	8,205,017
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1 Laporan	1	4,427,360	1	4,471,634	1	4,516,350	1	4,561,513	1	4,607,129
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	2 Laporan	2	3,457,500	2	3,492,075	2	3,526,996	2	3,562,266	2	3,597,888
<b>2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah agar tetap berfungsi dan dalam kondisi baik untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi yang terpelihara baik (kendaraan dinas, peralatan dan mesin kantor/jumlah rencana target pemeliharaan*100%	%	80%	80	250,133,967	80	252,635,307	80	255,161,660	80	257,713,276	80	260,290,409
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6 Unit	6	247,623,067	6	250,099,298	6	252,600,291	6	255,126,294	6	257,677,556
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1 Unit	1	2,510,900	1	2,536,009	1	2,561,369	1	2,586,983	1	2,612,853

#### 4.4 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel.4.4  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM UNGGULAN	PENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET			
1	2	3	4	5	6	7			
<b>PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH</b>									
1	Program Memangkas Rentang kendali (Akses Transportasi)	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi Laut		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kegiatan	
						2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan	
						2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan	
						2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan	
						2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Sub Kegiatan	
						2.15.03.2.12.0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Sub Kegiatan	
2	Program Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	
						2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	
						2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	
						2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan	
						2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	
						2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	
<b>PROGRAM PRIORITAS OPD</b>									
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kegiatan
							2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
							2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
							2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan
							2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Sub Kegiatan
							2.15.03.2.12.0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Sub Kegiatan

					Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan
								2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Sub Kegiatan
								2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Sub Kegiatan
					Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kegiatan
								2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Sub Kegiatan
								2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sub Kegiatan
					Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Kegiatan
								2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah, TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Sub Kegiatan
								2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sub Kegiatan



#### 4.5 Target keberhasilan capaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian tujuan strategis dan sasaran yang telah dirumuskan, penilaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan yang dirancang. Indikator kinerja Utama (IKU) perangkat daerah selama lima tahun ke depan disusun untuk menggambarkan capaian yang diharapkan pada masing-masing bidang, mencakup tata kelola pemerintahan, pengendalian lingkungan hidup, dan peningkatan layanan transportasi. Indikator ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan tetapi juga panduan dalam merancang strategi pelaksanaan yang lebih terarah dan akuntabel. Berikut adalah tabel indikator kinerja utama perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

**Tabel. 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0.54	0.58	0.62	0.66	0.70	0.74	
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	84.52	84.89	85.27	85.64	86.02	86.39	
3	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	%	0.04	0.09	0.14	0.20	0.25	0.29	
4	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	%	0.10	0.12	0.14	0.17	0.19	0.22	
5	Nilai SAKIP	Predikat	B	B	B	B	B	BB	
		Angka	66.90	67.02	67.40	68.44	69.48	70.52	



#### 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam rangka mewujudkan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, melalui program - program dan kegiatan perangkat daerah yakni menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Daerah (IKD) perangkat daerah selama lima tahun ke depan disusun untuk menggambarkan capaian yang diharapkan pada masing-masing bidang, mencakup Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif) dan (Tahunan). Berikut adalah tabel indikator kinerja Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan:

**Tabel. 4.6**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	80.61	84.52	84.89	85.27	85.64	86.02	86.39	
2	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	6.21	0.64	17.53	20.28	23.03	25.78	28.53	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	55.96	56.08	58.83	61.57	64.32	67.06	69.81	
4	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)	%	0.03	0.04	0.09	0.14	0.20	0.25	0.29	
5	Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Tahunan)	%	0.09	0.10	0.12	0.14	0.17	0.19	0.22	



#### 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, melalui program - program dan kegiatan perangkat daerah yakni menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah selama lima tahun ke depan disusun untuk menggambarkan capaian yang diharapkan pada masing-masing bidang, mencakup konektivitas wilayah, pengendalian kualitas air dan udara, peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) serta peningkatan layanan pengelolaan sampah. Berikut adalah tabel indikator kinerja kunci perangkat daerah yang mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan:

**Tabel. 4.7**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Konektivitas Darat	Rasio	N/A	0.27	0.32	0.37	0.43	0.48	0.53	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	N/A	20.00	22.00	24.00	26.00	28.00	30.00	
3	Konektivitas Laut	Rasio	N/A	0.33	0.35	0.37	0.39	0.41	0.43	
4	Indeks Kualitas Air	%	60.00	60.00	60.10	60.20	60.30	60.40	60.50	
5	Indeks Kualitas Udara	%	94.45	94.45	94.55	94.65	94.75	94.85	94.95	
6	Persentase RTH	%	N/A	47.38	48.00	49.00	50.00	51.00	52.00	
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	N/A	52.20	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan, memanfaatkan peluang, dan mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui sinergi antara kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan, diharapkan Rencana Strategis ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan transportasi yang lebih baik. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan Renstra ini dengan semangat kolaborasi dan inovasi, demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Evaluasi dan pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap sasaran yang ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Semoga dokumen ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

**ABDUL KADIR, S.T., M.Si**

Pembina (Tk.I (IV.b)

NIP. 19790125 201001 1 007